

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasi, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. Sektor publik merupakan semua yang berhubungan dengan kepentingan publik mengenai penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik. Akuntansi sektor publik membahas tentang akuntansi yang digunakan di dalam organisasi sektor publik dan pemerintahan. Instansi pemerintahan dapat menggunakan akuntansi ini ketika mengambil keputusan (Sujarweni, 2020). Pembahasan pada subbab ini mengenai definisi, tujuan, serta sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik.

2.1.1 Definisi Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari akuntansi. Bagian ini menampilkan pencatatan transaksi keuangan pada jurnal yang sesuai. Posting bukti transaksi ke buku besar dengan rekening. Akun-akun yang termasuk dalam neraca dan akun surplus (defisit). Surplus (defisit) adalah keuntungan atau kerugian yang diperoleh selama suatu periode akuntansi, sedangkan neraca adalah laporan posisi keuangan suatu lembaga sektor publik selama suatu periode. Akuntansi keuangan sektor publik digunakan sebagai dasar

entitas sektor publik dalam memberikan informasi, perencanaan dan pelaporan kepada masyarakat (Bastian, 2017).

Akuntansi sektor publik dideskripsikan sebagai mekanisme teknis serta analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan aset publik pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akuntansi sektor publik erat kaitannya dengan penerapan dan pengolahan akuntansi pada instansi pemerintah. Penyediaan informasi, pengendalian manajemen serta akuntabilitas merupakan aspek utama di dalam akuntansi sektor publik (Indra, 2016)

Akuntansi sektor publik digunakan sebagai alat informasi untuk entitas pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan strategis, pengembangan program, penganggaran, evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja merupakan penggunaan informasi akuntansi oleh pemerintah. Pemerintah juga dapat menetapkan biaya standar untuk pelayanan publik dengan menggunakan data akuntansi. Sedangkan bagi masyarakat akuntansi keuangan sektor publik berfungsi sebagai alat informasi mengenai transparansi pengelolaan keuangan sektor publik (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pelaporan dan analisis transaksi keuangan dalam organisasi pemerintah dan lembaga publik.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Setelah mengetahui definisi dari akuntansi sektor publik, maka dapat diketahui akuntansi dalam organisasi sektor publik memiliki beberapa tujuan, hal ini dikemukakan oleh Mardiasmo (2018). Tujuan ini yaitu:

1. Pengendalian manajemen (*management control*)

Tujuan ini berkaitan dengan penyampaian data yang digunakan dalam pengelolaan kegiatan operasional serta pengalokasian sumber daya organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Tujuan ini berkaitan dengan penyampaian data yang memungkinkan manajemen melaporkan pelaksanaan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan program dan penggunaan sumber daya secara tepat dan efektif.

2.1.3 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang dikemukakan oleh Majid (2019) yaitu akuntansi sektor publik diarahkan untuk mencapai hasil tertentu yang memiliki manfaat bagi publik. Akuntansi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Sifat dan organisasi sektor publik terutama adalah tujuan, sifat dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi nonlaba (tidak mencari

laba). Tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraannya.

Sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik berorientasi tidak mencari keuntungan atau non laba.

2.2 Laporan Keuangan Sektor Publik

Akuntansi sektor publik harus memberikan laporan keuangan lebih rinci kepada publik seiring dengan meningkatnya tuntutan atas akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja organisasi. Data keuangan digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas sektor publik serta membantu proses pengambilan keputusan (Kawatu, 2019). Subbagian laporan keuangan sektor publik ini membahas komponen, definisi, dan tujuan laporan keuangan sektor publik.

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan Sektor Publik

Akuntabilitas sektor publik didasarkan pada laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan mencakup seluruh kegiatan operasional instansi yang disajikan dalam bentuk laporan selama periode tertentu. Entitas atau manajemen dalam merumuskan kebijakan atau keputusan menggunakan laporan keuangan (Thalib *et al.*, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan sektor publik adalah laporan yang disusun guna menyajikan data

mengenai posisi keuangan serta keseluruhan transaksi dalam suatu entitas pemerintah selama periode pelaporan. Prinsip sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan, evaluasi kondisi keuangan, penilaian efektivitas dan efisiensi, serta penetapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian kegiatan pemerintah di masa depan diperoleh dari analisis laporan keuangan (Presiden RI, 2010).

Laporan keuangan sektor publik dapat disimpulkan sebagai laporan yang menyajikan informasi keuangan mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Setelah mengetahui definisi dari laporan keuangan sektor publik, maka dapat diketahui tujuan laporan keuangan sektor publik menurut Kawatu (2019) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*compliance and stewardship*).

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan kepastian kepada pengguna laporan keuangan serta otoritas bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*accountability and retrospective reporting*).

Laporan keuangan berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Laporan-laporan ini berfungsi sebagai alat untuk memantau kinerja, evaluasi efektivitas manajemen,

serta mengidentifikasi tren jangka panjang. Entitas juga memberikan landasan dalam mencapai tujuan, membuat perbandingan dengan organisasi lain, dan menilai pemanfaatan sumber daya. Selain itu, laporan keuangan memberikan akses kepada pihak eksternal terhadap informasi biaya, sehingga memungkinkan mereka mengevaluasi efisiensi dan efektivitas organisasi dalam memanfaatkan barang dan jasa.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*planning and authorization information*).

Laporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu menginformasikan kebijakan di masa depan dan perencanaan kegiatan, serta memberikan rincian penting tentang pengalokasi dana.

4. Kelangsungan organisasi (*viability*).

Laporan keuangan digunakan oleh masyarakat dalam menilai keberlangsungan masa depan suatu organisasi atau satuan kerja ditinjau dari kemampuannya dalam menyalurkan barang dan jasa.

5. Hubungan masyarakat (*public relation*).

Laporan keuangan digunakan sebagai platform bagi organisasi untuk menunjukkan pencapaiannya kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pegawai dan masyarakat, serta berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat dan pihak lainnya.

6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*).

Laporan keuangan memberikan informasi terperinci tentang organisasi kepada pemangku kepentingan yang tertarik untuk memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai laporan keuangan.

2.2.3 Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

Setelah mengetahui tujuan laporan keuangan sektor publik maka dapat diketahui menurut Prasetya (2015), organisasi sektor publik memiliki komponen keuangan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran disusun untuk menunjukkan kepatuhan entitas sektor publik terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan ini mencakup informasi mengenai anggaran pendapatan dan belanja dalam suatu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan data tentang peningkatan atau penurunan saldo anggaran pada suatu periode tertentu. Laporan ini juga membandingkan saldo anggaran pada tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi aktiva dan pasiva instansi pemerintah selama periode waktu tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional memberikan ringkasan komprehensif tentang sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk kegiatan administratif.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan gambaran komprehensif tentang transaksi keuangan yang melibatkan pendapatan dan pengeluaran pemerintah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan ekuitas memberikan gambaran apakah terjadi peningkatan atau penurunan ekuitas pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan pengetahuan mengenai kebijakan fiskal dan keuangan, faktor makro ekonomi, pencapaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tantangan yang dihadapi, kebijakan akuntansi yang digunakan, penjelasan estimasi laporan keuangan, dan informasi tambahan yang relevan.

2.3 Laporan Arus Kas

Analisis sumber dana yang diperoleh serta pemanfaatan dana oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu merupakan tujuan utama laporan arus kas. Laporan ini berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pertanggungjawaban organisasi sektor publik atas pengelolaan kas. Laporan arus kas membantu para pemangku kepentingan untuk memahami kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan kas, serta menilai likuiditas, solvabilitas, dan flektabilitas keuangan (Sujarweni, 2020). Pada bagian laporan arus kas ini, akan dibahas mengenai definisi, tujuan, klarifikasi, dan metode yang terkait dengan penyusunan laporan arus kas.

2.3.1 Definisi Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan rincian saldo kas pemerintah untuk berbagai kegiatan seperti operasi, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran. Laporan ini menguraikan saldo awal pemerintah, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan laporan ini mengacu pada pedoman yang dituangkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah PSAP No. 03 yang khusus membahas mengenai Laporan Arus Kas. Namun, penyajian laporan arus kas hanya disajikan oleh entitas dengan fungsi perbendaharaan umum (Prasetya, 2015).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan arus kas memberikan rincian komprehensif mengenai aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan ini secara efektif menggambarkan saldo awal, pendapatan, pengeluaran, dan saldo akhir pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Hal ini mencakup pencatatan arus kas masuk dan keluar ke dalam buku kas dengan menggunakan akun pelaksanaan anggaran. Oleh sebab itu, laporan arus kas mencerminkan informasi yang terkandung dalam akun-akun tersebut (Presiden RI, 2010).

Laporan arus kas dapat disimpulkan sebagai laporan yang menyajikan informasi mengenai saldo awal kas, arus kas masuk dan arus kas keluar serta saldo akhir kas selama satu periode. Laporan arus kas membantu pemerintah atau organisasi sektor publik dalam mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta memahami pola penerimaan dan pengeluaran kas.

2.3.2 Tujuan Laporan Arus Kas

Setelah mengetahui definisi dari laporan arus kas, maka dapat diketahui tujuan penyusunan laporan arus kas menurut Mardiasmo (2018), adalah sebagai berikut :

1. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai arus kas di masa depan dan memberikan penilaian mengenai keakuratan proyeksi arus kas di masa lalu.
2. Laporan arus kas digunakan sebagai pencatatan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode pelaporan.
3. Laporan arus kas memberikan informasi bagi pengguna laporan untuk mengevaluasi perubahan ekuitas dan struktur fiskal pemerintah.

2.3.3 Klasifikasi Laporan Arus Kas

Setelah mengetahui tujuan penyusunan laporan arus kas, maka dapat diketahui klasifikasi laporan arus kas menurut Prasetya (2015) adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas Operasi

Kegiatan operasional pemerintah mencakup serangkaian aktivitas yang berkaitan secara langsung dengan pemerintah. Arus kas bersih dari kegiatan operasi berfungsi sebagai pedoman mengenai kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas untuk mendukung kegiatan operasinya di masa depan tanpa bergantung pada sumber pendapatan eksternal. Pada aktivitas tersebut terdapat penerimaan dan pengeluaran kas dari berbagai sumber. Penerimaan kas dari kegiatan operasi antara lain penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hibah, bagi hasil perusahaan negara/daerah, penyertaan modal, penerimaan lain-lain/penghasilan khusus, dan transfer masuk. Sementara itu, arus kas keluar dari aktivitas operasi dialokasikan untuk gaji karyawan, pembayaran barang, pembayaran bunga, pembayaran subsidi, pembayaran bantuan sosial, pembayaran transfer dan pembayaran lain/kegiatan khusus.

2. Aktivitas Investasi

Kegiatan investasi mencakup penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari pembelian dan penjualan aktiva tetap serta investasi lainnya yang tidak diklasifikasikan sebagai setara kas. Arus kas yang diperoleh dari kegiatan investasi ini berfungsi untuk meningkatkan serta mempertahankan penyediaan layanan pemerintah kepada masyarakat pada periode mendatang. Dalam aktivitas ini, terdapat penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan berbagai

kegiatan. Penerimaan kas dari kegiatan investasi meliputi penjualan aktiva tetap, penjualan aktiva lain-lain, pelepasan cadangan, dan penjualan investasi surat berharga. Sementara itu, pengeluaran kas dari aktivitas investasi mencakup perolehan aktiva tetap, perolehan aktiva lain-lain, penyertaan modal pemerintah, dan perolehan surat berharga investasi.

3. Aktivitas Pendanaan

Kegiatan pendanaan mencakup penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan perolehan piutang jangka panjang dan pelunasan kewajiban jangka panjang, sehingga menyebabkan perubahan jumlah piutang dan kewajiban jangka panjang. Penerimaan kas dari kegiatan pendanaan mencakup pendapatan dari kewajiban luar negeri, kewajiban obligasi, pinjaman dari pemerintah daerah, serta pinjaman dari badan usaha milik negara. Sementara itu, pengeluaran kas dari kegiatan pendanaan mencakup pelunasan pokok utang luar negeri, pelunasan pokok obligasi, pencairan kas pinjaman pemerintah daerah, dan arus keluar kas dari pinjaman Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

4. Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk dan arus keluar yang berada di luar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dikategorikan sebagai aktivitas transitoris. Arus kas transitoris mencakup berbagai transaksi akuntansi yang melibatkan pihak ketiga, transfer ke/dari Bendahara, serta

pencairan dan pengiriman uang. Perhitungan dari pihak ketiga berkaitan dengan penerimaan kas yang berasal dari pemotongan perintah pembayaran atau diterima oleh entitas pihak ketiga seperti Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dan Askes (Asuransi Kesehatan). Pengiriman uang melibatkan *transfer* uang tunai antar rekening bersama di negara bagian atau wilayah yang berbeda.

2.3.4 Metode Laporan Arus Kas

Menurut Kawatu (2019), terdapat dua metode dalam proses penyusunan laporan arus kas. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas yaitu :

1. Metode Langsung

Metode langsung merupakan proses penyusunan laporan arus kas yang mengelompokkan rincian jumlah penerimaan dan pengeluaran kas dari berbagai aktivitas instansi.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung merupakan proses penyusunan laporan arus kas yang disesuaikan dengan transaksi operasi non tunai, pengakuan tangguhan atau aktual atas penerimaan atau pengeluaran kas, serta penerimaan dan beban dalam bentuk investasi kas yang terkait dengan kegiatan pendanaan.

2.4 Rasio Arus Kas

Penelitian ini menggunakan analisis rasio arus kas untuk menganalisis laporan arus kas. Menurut Darsono (2015), menggunakan metode

langsung analisis laporan arus kas dapat dilakukan dengan rasio arus kas sebagai berikut :

2.4.1 Rasio Arus Kas Operasi (AKO)

Rasio arus kas operasi mengestimasi kemampuan arus kas operasi untuk membiayai *liabilitas* lancar. Rasio ini diperoleh dengan cara melakukan operasi pembagian antara arus kas operasi dengan kewajiban lancar.

$$AKO = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Sumber : Darsono (2015)

Rasio arus kas operasi dengan hasil di atas 1 menunjukkan kinerja keuangan baik, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sanggup untuk melunasi kewajiban lancarnya. Sementara itu, rasio arus kas operasi dengan hasil di bawah 1 menunjukkan bahwa kinerja keuangan buruk, hal ini memungkinkan ada risiko pemerintah tidak sanggup melunasi kewajiban lancarnya tanpa memanfaatkan arus kas dari kegiatan lainnya.

2.4.2 Rasio Pengeluaran Modal (PM)

Rasio ini menaksir ekuitas yang tersedia guna berinvestasi dan membayar kewajiban yang belum jatuh tempo. Rasio ini diperoleh dengan cara melakukan operasi pembagian antara arus kas operasi dengan pengeluaran modal.

$$PM = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Pengeluaran Modal}}$$

Sumber : Darsono (2015)

Rasio pengeluaran modal dengan hasil di atas 1 menunjukkan kinerja keuangan baik, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat membiayai belanja modal dengan menggunakan arus kas operasi. Sementara itu, rasio pengeluaran modal dengan hasil di bawah 1 menunjukkan bahwa kinerja keuangan buruk, hal ini memungkinkan ada risiko pemerintah tidak dapat membiayai belanja modal dengan menggunakan arus kas operasi.

2.4.3 Rasio Arus Kas Bersih Bebas (AKBB)

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban kasnya di masa depan. Rasio tersebut diperoleh dengan cara belanja modal dikurangi dengan arus kas dari aktivitas operasi kemudian dibagi dengan total kewajiban.

$$AKBB = \frac{\text{Arus Kas Operasi} - \text{Pengeluaran Modal}}{\text{Total Kewajiban}}$$

Sumber : Darsono (2015)

Rasio arus kas bersih bebas dengan hasil di atas 1 menunjukkan kinerja keuangan baik, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat memenuhi kewajiban keuangannya di masa depan. Sementara itu, rasio arus kas bersih bebas dengan hasil di bawah 1 menunjukkan bahwa kinerja keuangan buruk, hal ini memungkinkan ada risiko pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya di masa depan.

2.5 Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2016), kinerja keuangan merupakan deskripsi posisi keuangan suatu organisasi sektor publik atau perusahaan selama periode waktu tertentu. Hal ini mencakup penerimaan dan pengeluaran kas dan biasanya diukur dengan indikator likuiditas dan belanja modal. Sementara itu, menurut Mulyadi (2017) kinerja keuangan adalah penilaian secara periodik seberapa efektif kegiatan operasi suatu organisasi berdasarkan standar, sasaran, serta aturan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan seberapa baik suatu perusahaan dan instansi dalam mengelola serta penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan.

Menurut Munawir (2019), analisis rasio keuangan menjadi landasan dalam mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja keuangan. Sementara itu, menurut Irham (2020) penilaian kinerja keuangan melibatkan analisis kepatuhan organisasi terhadap aturan penerapan keuangan yang tepat dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

Penilaian kinerja keuangan dapat disimpulkan sebagai proses analisis berbagai aspek keuangan perusahaan dan instansi untuk menentukan seberapa baik perusahaan dan instansi beroperasi dalam mencapai tujuannya.

Menurut Irham (2020), terdapat lima tahapan yang diperlukan untuk menganalisis kinerja keuangan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu:

1. Memeriksa data laporan keuangan
2. Melakukan perhitungan
3. Membandingkan hasil perhitungan
4. Menafsirkan masalah yang diperoleh
5. Memberikan solusi untuk masalah yang diperoleh.

Menurut Munawir (2019), mengatakan tujuan pengukuran kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat likuiditas

Likuiditas mencerminkan kinerja organisasi sektor publik atau perusahaan dalam melunasi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan setelah jatuh tempo.

2. Memahami tingkat solvabilitas

Solvabilitas mencerminkan kinerja organisasi sektor publik atau perusahaan untuk melunasi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang berfungsi untuk referensi dalam penyusunan penelitian ini.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Putri (2019) “Analisis Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KLM Dengan Menggunakan Metode Rasio Arus Kas”.	Rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar, pengeluaran modal, total hutang dan laba bersih.	Metode analisis deskriptif dan kuantitatif	Hasil penelitian yang didasarkan pada analisis laporan arus kas menunjukkan bahwa kinerja keuangan RSUD KLM pada tahun 2017 baik, tetapi pada tahun 2018 tidak baik.
2.	Saifrizal (2022) “Analisis Rasio Arus Kas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Di Kabupaten Bireuen”	Rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar, pengeluaran modal, total hutang dan laba bersih.	Metode analisis deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian yang didasarkan pada analisis laporan arus kas menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada BPKD Kabupaten Bireuen baik.
3.	Jannah & Cahya, (2022) “Analisis Rasio Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir”	Rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar, pengeluaran modal.	Metode deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian yang berdasarkan analisis arus kas menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir cukup baik.
4.	Thalib <i>et al.</i> (2019) “Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi CU (Credit Union) Daya Lestari Periode 2016-2018 Berdasarkan Rasio Arus Kas”	Rasio arus kas operasi, bunga, pengeluaran modal, total hutang, dan laba bersih	Metode deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Koperasi Credit Union Daya Lestari pada tahun 2016-2018 berdasarkan rasio arus kas dikatakan

						kurang baik.
5.	Yenni, Arifin, Eddy Gunawan (2022) “Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan”	Rasio Operasi Kewajiban Bunga, Modal, Hutang, dan Laba Bersih. Total Hutang	Arus Kas terhadap Lancar, Pengeluaran	Metode deskriptif kuantitatif		Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio arus kas operasi perusahaan cukup baik

Sumber : Penelitian Terdahulu